

# Outline Journal of Economic Studies

Journal homepage: <https://journal.outlinepublisher.com/index.php/OJES/index>

Research Article

## Analysis of poverty in eastern Indonesia (Analisis Kemiskinan Di Kawasan Timur Indonesia))

Fadila Nisa <sup>1</sup>, Rika Anggraini <sup>2</sup>, Aisyah Ameilia<sup>3</sup>

<sup>12345</sup>Universitas Negeri Medan, Indonesia

\*Correspondence: E-mail: [fadilnisa1904@gmail.com](mailto:fadilnisa1904@gmail.com)

### Abstract

Keywords:

Poverty,  
Economic Growth,  
Income Distribution  
Unemployment  
Education  
Health

This study was conducted to analyze the effect of economic growth, income distribution, unemployment, education and health on poverty in Eastern Indonesia in 2013-2017. Independent variables used in this study are economic growth, income distribution, unemployment, education and health and poverty as dependent variable. The data used in this study are secondary data sourced from the Central Statistics Agency of Maluku Province consisting of time series data for 2013 - 2017 and cross section data for 12 provinces in Eastern Indonesia. The analytical method used is panel data regression analysis. The results showed that economic growth had a positive and not significant effect on poverty in Eastern Indonesia. Variable income distribution has a positive and not significant effect on poverty in Eastern Indonesia. The unemployment variable has a positive and significant effect on the poverty variable in Eastern Indonesia. Education and health variables have a positive and significant effect on poverty in Eastern Indonesia. The coefficient of determination is 0.993136, meaning that the poverty variable can be explained by variables of economic growth, income distribution, unemployment, education and health by 99.31%. Simultaneous test results (F test), showed variables of economic growth, income distribution, unemployment, education and health simultaneously had a significant effect on poverty in Eastern Indonesia.

## PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian bagi pemerintah di negara manapun baik di negara berkembang maupun negara maju. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dalam rangka memperbaiki taraf hidupnya. (BPS, 2008:1).

Berdasarkan Permendagri No.56-2015 tentang kodifikasi dan tata wilayah administrasi per provinsi menyebutkan jumlah provinsi di Indonesia sebanyak 34 provinsi. Provinsi-provinsi tersebut terbagi menjadidua kawasan yang kemudian kita kenal dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Dalam perjalanannya, ternyata kedua kawasan tersebut memperlihatkan kecenderungan bahwa provinsi-provinsi yang terletak di Kawasan Barat Indonesia (KBI) pada umumnya mengalami perkembangan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan daerah atau provinsi yang berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Misalnya ketersediaan infrastruktur, sarana transportasi, fasilitas pendidikan dan kesehatan di KBI jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan daerah di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan memiliki sekitar 17.000 pulau. Namun, kemiskinan masih menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh negara ini. Data menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia terus menurun selama dua dekade terakhir, namun masih cukup tinggi di kawasan Timur Indonesia. Kawasan Timur Indonesia terdiri dari provinsi-provinsi di Pulau Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tenggara. Wilayah ini dikenal dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Berbagai faktor dapat memengaruhi tingginya tingkat kemiskinan di kawasan ini, seperti akses terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan, serta ketimpangan pembangunan infrastruktur. (BPS,2010:1)

Pembangunan ekonomi melalui desentralisasi, dimana masing-masing daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengelola daerahnya tidak meluputkan daerah-daerah di Kawasan Timur Indonesia darimasalah kemiskinan. Justru yang terjadi adalah sebagian besar provinsi di wilayah KTI masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi dengan angka kemiskinan di atas rata-rata nasional, kecuali provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2016 menampilkan 10 provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi didominasi oleh provinsi di Kawasan timur Indonesia yaitu, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, NTB dan Sulawesi Tengah sedangkan sisanya 3 provinsi yang berada di Kawasan Barat Indonesia yaitu provinsi Aceh, Bengkulu dan Lampung.

Oleh karena itu, analisis kemiskinan di kawasan Timur Indonesia perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan di wilayah ini dan untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan di kawasan tersebut. Studi ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah kemiskinan di kawasan Timur Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana.

**Tabel 1**  
**Persentase Kemiskinan menurut Provinsi di Kawasan Timur Indonesia (%)**

Provinsi	2013	2014	2015	2016	2017
NTB	17,25	17,05	16,54	16,02	15,05
NTT	20,24	19,6	22,58	22,01	21,38
Sulut	8,5	8,26	8,98	8,2	7,9
Sulteng	14,32	13,61	14,07	14,09	14,22
Sulsel	10,32	9,54	10,12	9,24	9,48

Sultra	13,73	12,77	13,74	12,77	11,97
Gorontalo	18,01	17,41	18,16	17,63	17,14
Sulbar	12,23	12,05	11,9	11,19	11,18
Maluku	19,27	18,44	19,36	19,26	18,29
Malut	7,64	7,41	6,22	6,41	6,44
Papua Barat	27,14	26,26	25,73	24,88	23,12
Papua	31,53	27,8	28,4	28,4	27,76
<b>Total</b>	<b>16,68</b>	<b>15,85</b>	<b>16,31</b>	<b>15,84</b>	<b>15,36</b>

*Sumber : BPS 2013-2017*

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat kita lihat provinsi yang memiliki persentase kemiskinan tertinggi pada tahun terakhir yakni 2017 berada di provinsi Papua sebesar 27 %, kemudian disusul oleh provinsi Papua Barat sebesar 23 % dan provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 21%. Sedangkan provinsi di Kawasan Timur Indonesia yang menunjukkan persentase kemiskinan tersendah yaitu berada pada provinsi 6% lebih baik daripada provinsi Sulawesi Utara dan provinsi Sulawesi Selatan yang secara factual memiliki kondisi perekonomian yang cukup baik. Sebagai cerminan kesejahteraan ekonomi dan penduduk suatu daerah maka dapat dilihat melalui pertumbuhan ekonomi sebab pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang familier dalam menentukan keberhasilan suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai ukuran atas perkembangan atau kemajuan perekonomian dari suatu negara atau wilayah karena berkaitan dengan aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat khususnya dalam hal peningkatan produksi barang dan jasa. Peningkatan tersebut kemudian diharapkan dapat memberikan trickle down effect yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dengan sendirinya akan menekan angka kemiskinan. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi menjadi target utama dalam pembangunan. Pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik, secara material maupun spiritual (Todaro, 2003).

Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2018, Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia yang paling tertinggi di tahun 2015 yaitu sebesar 8,24%. Sementara disisi lain, Badan Pusat Statistik tahun 2016 menyebutkan bahwa Pembangunan di Indonesia didominasi oleh provinsi-provinsi di Kawasan Barat Indonesia, sehingga pembangunan di Kawasan Timur Indonesia menjadi relatif masih jauh tertinggal. Data BPS menunjukkan bahwa 80-an persen PDB Indonesia di dominasi oleh provinsi-provinsi di Kawasan Barat Indonesia, sedangkan sisanya terdistribusi di seluruh provinsi di Kawasan Timur Indonesia (BPS,2016).

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah pengangguran, salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan, pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (full employment) dapat terwujud. Pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat, dan itu akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah tercapai. Semakin turunnya tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan (Sukirno 2000).

Kualitas Sumber Daya Manusia pada dasarnya dapat diukur dengan tingkat pendidikan dan Kesehatan. Hampir tidak ada yang membantah bahwa pendidikan adalah pionir dalam pembangunan masa depan bangsa. Jika pendidikan suatu bangsa sudah bobrok, maka kehancuran bangsa tersebut tinggal menunggu waktu. Sebab pendidikan menyangkut pembangunan karakter sekaligus mempertahankan jati diri manusia. Oleh karena itu, menjadi penting bagi kita untuk memahami bahwa kemiskinan dapat mengakibatkan kebodohan dan kebodohan identik dengan kemiskinan (Winardi 2010, dalam <http://winardi-andalas-putro-blogspot.com>)

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Konsep dan Defenisi Kemiskinan**

Kemiskinan memiliki pengertian yang beragam, namun secara umum kemiskinan dapat diartikan sebagai masalah yang muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. World Bank (2010) mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan dalam kesejahteraan, dan terdiri dari banyak dimensi. Hal ini termasuk penghasilan rendah dan ketidakmampuannya untuk mendapatkan barang dasar dan layanan yang diperlukan untuk bertahan hidup. Kemiskinan juga meliputi rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan, akses masyarakat miskin terhadap air bersih dan sanitasi, keamanan fisik yang tidak memadai, kurangnya sarana dan fasilitas yang memadai, serta kesempatan untuk hidup yang lebih baik. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya darisegi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan (Wikipedia.com,2012).

Menurut BPS (2010), bahwa penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan makanan adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Garis kemiskinan non makanan merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Menurut Amartya Sen dalam Bloom dan Canning, (2001) bahwa seseorang dikatakan miskin bila mengalami "capability deprivation" dimana seseorang tersebut mengalami kekurangan kebebasan yang substantif. Menurut Bloom dan Canning, kebebasan substantif ini memiliki dua sisi: kesempatan dan rasa aman. Kesempatan membutuhkan pendidikan dan keamanan membutuhkan kesehatan. Disisi lain, Fernandes (2001) dalam Arsyad (2010), menambahkan tentang beberapa ciri masyarakat miskin ditinjau dari berbagai aspek, antara lain :

- Aspek Politik: tidak memiliki akses ke proses pengambilan Keputusan yang menyangkut hidup mereka
- Aspek sosial: tersingkir dari institusi utama masyarakat yang ada
- Aspek ekonomi: rendahnya kualitas SDM, termasuk kesehatan, pendidikan, keterampilan yang berdampak pada rendahnya penghasilan; dan rendahnya kepemilikan atau aset fisik, termasuk aset lingkungan hidup seperti air bersih dan penerangan
- Aspek budaya atau nilai: terperangkap dalam budaya rendahnya kualitas SDM seperti seperti rendahnya etos

kerja, berfikir pendek dan mudah menyerah.

### **Garis Kemiskinan**

Garis kemiskinan adalah suatu ukuran yang menyatakan besarnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan kebutuhan non makanan, atau standar yang menyatakan batas seseorang dikatakan miskin bila dipandang dari sudut konsumsi. Garis kemiskinan yang digunakan setiap negara berbedabeda, sehingga tidak ada satu garis kemiskinan yang berlaku umum. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. Menurut BPS (2010), penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan

2.100 kilokalori per kapita per hari. Sedangkan untuk pengeluaran kebutuhan minimum non makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, pendidikan dan kesehatan.

### **Penyebab Kemiskinan**

World Bank mengidentifikasi penyebab kemiskinan dari perspektif akses dari individu terhadap sejumlah aset yang penting dalam menunjang kehidupan, yakni aset dasar kehidupan (misalnya kesehatan dan keterampilan/pengetahuan), aset alam (misalnya tanah pertanian atau lahan olahan), aset fisik (misalnya modal, sarana produksi dan infrastruktur), aset keuangan (misalnya kredit bank dan pinjaman lainnya), dan aset sosial (misalnya jaminan sosial dan hak-hak politik). Ketiadaan akses dari satu atau lebih dari aset-aset diatas merupakan penyebab seseorang masuk ke dalam kemiskinan.

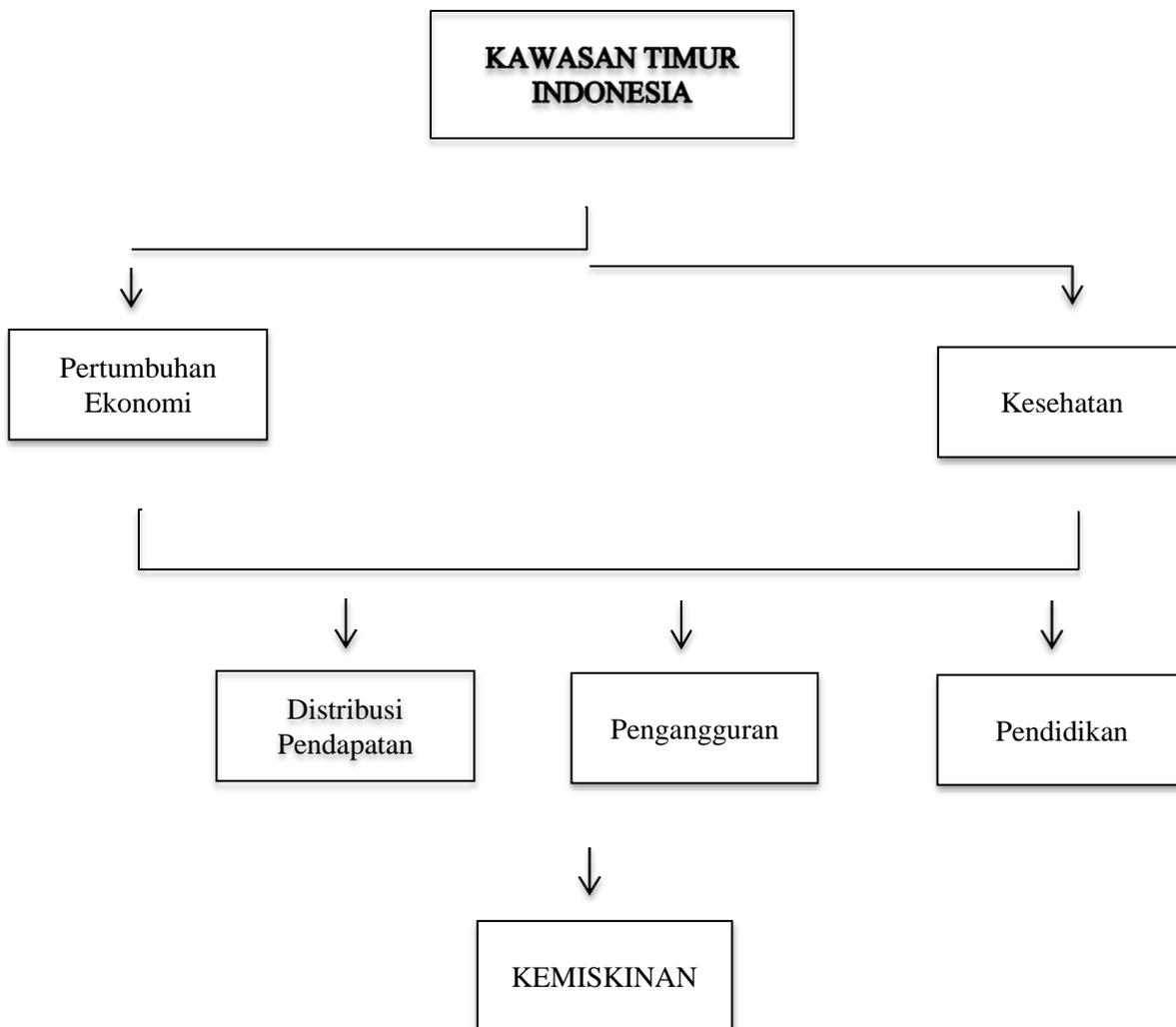
Menurut Samuelson dan Nordhaus (1997), penyebab dan terjadinya penduduk miskin di negara yang berpenghasilan rendah adalah karena dua hal pokok, yaitu rendahnya tingkat kesehatan dan gizi, dan lambatnya perbaikan mutu pendidikan. Oleh karena itu, upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah melakukan pemberantasan penyakit, perbaikan kesehatan dan gizi, perbaikan mutu pendidikan, pemberantasan buta huruf, dan peningkatan keterampilan penduduknya. Kelima hal itu adalah upaya untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia.

### **Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan**

Kemiskinan meliputi berbagai aspek. Kemiskinan sangat terkait dengan kepemilikan modal, kepemilikan lahan, sumber daya manusia, kekurangan gizi, pendidikan, pelayanan kesehatan, pendapatan per kapita yang rendah, dan minimnya investasi. Masih banyak variable kemiskinan yang melekat pada orang miskin. Dengan begitu, konsep kemiskinan perlu dikembangangi karena akan sangat berpengaruh bagi program pengurangan kemiskinan di daerah berdasarkan corak dan karakteristik kemiskinan itu sendiri dan penyatuan gerak program pengurangan kemiskinan perlu dilakukan, mengingat selama ini banyak ukuran-ukuran kemiskinan yang dipakai.

Misalnya, Scott (1979:5) melihat kemiskinan dari sisi pendapatan rata-rata per kapita (income per capite) dan Sen (1981:22) mengkaji kemiskinan dari sudut pandang kebutuhan dasar (basic needs). Di Indonesia, ukuran kemiskinan yang terkenal adalah yang dibuat oleh Sayogyo (1977:10) yaitu Parameter Kemiskinan. Parameter kemiskinan tersebut yang mengukur kemiskinan. Misalnya konsumsi beras perkapita per tahun, yaitu di bawah 420 kg bagi daerah perkotaan dan 320 kg bagi daerah pedesaan. Perbedaan ini dapat kita ketahui karena jumlah penduduk yang berbeda di kedua tempat tersebut. Penduduk di perkotaan mempunyai kebutuhan yang relatife lebih banyak dibandingkan penduduk di pedesaan sehingga mempengaruhi pola pengeluaran.

Untuk memudahkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan serta untuk memperjelas akar pemikiran dalam penelitian riset ini, berikut ini gambar kerangka pemikiran yang sistematis.



**Gambar (1)** Kerangka Pemikiran

## METODE PENELITIAN

### Ruang lingkup Penelitian

Penelitian kemiskinan pada kawasan Timur Indonesia dianalisis untuk periode 2013-2017 yang dilakukan di 12 provinsi yaitu NTB, NTT, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra, Gorontalo Sulbar, Maluku, Malut, Papua Barat serta Papua. Alasan memilih lokasi penelitian ini karena pada Indonesia bagian timur pemenuhan akan fasilitas penunjang, serta kegiatan industri masih rendah sehingga menjadi salah satu penyebab dari faktor kemiskinan yang terjadi dibandingkan dengan wilayah Indonesia bagian lainnya. Data sekunder yang dipakai pada riset ini merupakan data publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) kawasan Timur Indonesia. Data yang diperoleh dari BPS dan berbagai institusi (lembaga) yang relevan dengan penelitiannya.

### Populasi dan Sampel

Menurut Arikunto (2010) bahwa populasi adalah seluruh objek yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, pengangguran, pendidikan, kesehatan dan kemiskinan di kawasan Timur Indonesia. Sampel dalam penelitian riset ini adalah pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, pengangguran, pendidikan, kesehatan dan kemiskinan di kawasan Timur Indonesia dari periode tahun 2013-2017.

### Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang dilakukan dengan studi pustaka (Library Research), maka data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan literature yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, pengangguran, pendidikan, kesehatan terhadap kemiskinan yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel (2) Koefisien Regresi provinsi di Kawasan Timur Indonesia Dependent Variable: Y

C	11.36742	2733466	4.158610	0.0002
X1	0.043341	0.041213	1.051617	0.2988
X2	1.913216	5.543092	0.345153	0.7317
X3	0.128877	0.149970	0.859352	0.3949
X4	0.495336	0.149725	3.308304	0.0019
X5	0.037425	0.076662	0.488188	0.6279

Sumber : Hasil Pengolahan data Eview

Berdasarkan tabel diatas diperoleh:

1. Koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi yang dinotasikan dengan ( $\beta_1$ ) sebesar 0.043341. Nilai koefisien variabel pertumbuhan ekonomi ( $\beta_1$ ) tersebut ternyata berpengaruh positif dan tidak signifikan

terhadap variabel kemiskinan. Hal ini dapat diketahui dengan membandingkan antara nilai probabilitas (p-value) uji-t harus lebih kecil daripada  $\alpha$  (alpha) = 5% atau membandingkan t-statistik yang harus lebih besar daripada t-tabel. Tampilan hasil estimasi memperlihatkan bahwa uji-t untuk koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi ( $\beta_1$ ) memiliki nilai probabilitas (p-value) sebesar  $0,2988 > 0,05$  ( $\alpha = 5\%$ ) yang ditunjukkan juga oleh nilai t-hitung sebesar  $1.051617 < t\text{-tabel}$  (1,67109). Koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi yang dinotasikan dengan  $\beta_1$  sebesar 0.043341 mengandung arti bahwa apabila pertumbuhan ekonomi meningkat 1 (satu) persen, maka akan mengakibatkan kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia mengalami peningkatan sebesar 4% dengan asumsi ceteris paribus (faktor-faktor lain di anggap konstan).

2. Diperoleh koefisien regresi variabel distribusi pendapatan yang dinotasikan dengan  $\beta_2$  sebesar 1.913216. nilai koefisien variabel distribusi pendapatan ( $\beta_2$ ) tersebut ternyata berpengaruh positif dan tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi  $\alpha$  (alpha) = 5% atau tingkat kepercayaan sebesar 95%. Dapat diketahui dengan membandingkan antara nilai probabilitas (p-value) uji-t yang harus lebih kecil daripada  $\alpha = 5\%$ , atau membandingkan t-tabel yang harus lebih kecil dari t-hitung/statistik. Tampilan hasil estimasi memperlihatkan bahwa hasil uji-t untuk koefisien regresi variabel distribusi pendapatan memiliki nilai probabilitas (p-value) sebesar  $0,7317 > 0,05\%$  ( $\alpha = 5\%$ ) yang ditunjukkan juga oleh nilai t-hitung/statistik sebesar  $0.345153 < t\text{-tabel}$  (1,67109). Koefisien regresi variabel distribusi pendapatan ( $\beta_2$ ) sebesar 1.913216 mengandung arti bahwa apabila distribusi pendapatan meningkat 1 (satu) persen maka akan mengakibatkan kemiskinan di Kawasan Barat Indonesia mengalami peningkatan sebesar 19%, dengan asumsi ceteris paribus (faktor-faktor lain dianggap konstan)
3. Diperoleh koefisien regresi variabel tingkat pengangguran yang dinotasikan dengan  $\beta_3$  sebesar 0.128877. nilai koefisien regresi variabel ( $\beta_3$ ) tersebut ternyata berpengaruh positif dan tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi  $\alpha$  (alpha) = 5%. Hal ini dapat diketahui dengan membandingkan antara nilai probabilitas (p-value) uji-t harus lebih kecil daripada  $\alpha$  (alpha) = 5% atau membandingkan t-statistik yang harus lebih besar daripada t-tabel. Tampilan hasil estimasi memperlihatkan bahwa uji-t untuk koefisien ( $\beta_3$ ) memiliki nilai probabilitas (p-value) sebesar  $0,3949 > 0,05$  ( $\alpha = 5\%$ ) yang ditunjukkan juga oleh nilai t-statistik sebesar  $0.859352 < t\text{-tabel}$  (1,67109) Koefisien regresi variabel tingkat pengangguran ( $\beta_3$ ) sebesar 0.128877 mengandung arti bahwa apabila tingkat pengangguran meningkat 1 (satu) persen maka kemiskinan di Kawasan Barat Indonesia mengalami peningkatan sebesar 12%, dengan asumsi ceteris paribus (faktor-faktor lain dianggap konstan)
4. Diperoleh koefisien regresi variabel pendidikan yang dinotasikan dengan  $\beta_4$  sebesar 0.495336. nilai koefisien regresi variabel  $\beta_3$  tersebut ternyata berpengaruh positif dan signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi  $\alpha$  (alpha) = 5%. Tampilan hasil estimasi memperlihatkan bahwa uji-t untuk koefisien  $\beta_4$  memiliki nilai probabilitas (p-value) sebesar  $0,0019 < 0,05$  ( $\alpha = 5\%$ ) yang ditunjukkan juga oleh nilai t-statistik sebesar  $3.308304 > t\text{-tabel}$  (1,67109) atau berpengaruh signifikan pada tingkat signifikansi alfa sebesar 5%. Koefisien regresi variabel pendidikan ( $\beta_4$ ) sebesar 0.495336 mengandung arti bahwa apabila tingkat pendidikan meningkat 1 (satu) persen maka variabel kemiskinan di Kawasan Barat Indonesia meningkat sebesar 49%, dengan asumsi ceteris paribus (faktor-faktor lain dianggap konstan)

5. Diperoleh koefisien regresi variabel kesehatan yang dinotasikan dengan  $\beta_5$  sebesar 0.037425. nilai koefisien regresi  $\beta_5$  tersebut ternyata berpengaruh positif dan tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi  $\alpha$  (alpha) = 5%. Hal ini dapat diketahui dengan membandingkan antara nilai probabilitas (p-value) uji-t harus lebih kecil daripada  $\alpha$  (alpha) = 5% atau membandingkan t-statistik yang harus lebih besar daripada t-tabel. Tampilan hasil estimasi memperlihatkan bahwa uji-t untuk koefisien  $\beta_4$  memiliki nilai probabilitas (p-value) sebesar  $0.0079 < 0,05$  ( $\alpha = 5\%$ ) yang ditunjukkan juga oleh nilai t-statistik sebesar  $2.488188 > t\text{-tabel}$  (1,67109) atau berpengaruh signifikan pada tingkat signifikansi alfa sebesar 5%. Koefisien regresi variabel kesehatan ( $\beta_5$ ) sebesar - 0.037425 mengandung arti bahwa apabila tingkat kesehatan meningkat 1 (satu) persen maka akan menurunkan tingkat kemiskinan di Kawasan Barat Indonesia sebesar 3%, dengan asumsi ceteris paribus (faktor-faktor lain dianggap konstan). Sedangkan effect untuk masing-masing cross section yaitu untuk masing-masing provinsi pada Kawasan Timur Indonesia merupakan differential intercept dari persamaan regresi. Efek tersebut akan membedakan intercept untuk persamaan pada masing-masing unit cross section. Perbedaan intercept untuk masing-masing wilayah provinsi tersebut menunjukkan adanya perbedaan faktor-faktor endowment (sumberdaya alam dan sumberdaya manusia) dan adat istiadat setempat serta perbedaan kebijakan pemerintah masing-masing provinsi di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia terutama dalam hal pengentasan Kemiskinan serta faktor-faktor lainnya, (Gujarati, 2003).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Model regresi pengaruh pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, pengangguran, pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia tahun 2013 – 2017 layak digunakan karena telah memenuhi dan melewati pengujian F-statistik dan uji Hausman.
2. Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) pengaruh pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, pengangguran, pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia tahun 2013 – 2017 menunjukkan bahwa  $R^2$  yaitu 0.993136. nilai ini berarti model yang dibentuk sangat baik, sebab sebesar 99,31% variasi variabel dependen yaitu tingkat kemiskinan dapat dijelaskan dengan baik oleh variabel- variabel independent yakni pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, pengangguran, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan sisanya 0,69% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model penelitian ini. Dengan demikian diperlukan juga adanya penelitian yang lebih lanjut untuk menganalisis variabel-variabel lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan.
3. Uji F statistik menunjukkan bahwa semua variabel independen dalam model regresi pengaruh pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, pengangguran, pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia tahun 2013 – 2017 secara bersama-sama mempengaruhi variabel kemiskinan.

4. Dari hasil regresi pengaruh pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, pengangguran, pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia tahun 2013 – 2017 dapat disimpulkan bahwa pada taraf keyakinan 95% ( $\alpha = 5\%$ ), variabel pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, pengangguran, pendidikan dan kesehatan secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif, S. (1998). *Teori dan Kebijakan Pembangunan*. Penerbit Pustaka CIDESINDO.
- Hernatasa. (2004). Analisis Utang Luar Negeri Indonesia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Bogor. Tesis Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. <https://bi.go.id> <https://bps.go.id>
- Junaedi, A. (2018). Hubungan Antara Utang Luar Negeri dengan Perekonomian dan Kemiskinan: Komparasi Antarezim Pemerintahan. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 563-587. <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/154>
- Khair, M., & Rusydi, B. U. (2016). Analisis Pengaruh Utang Luar Negeri (*Foreign Debt*) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. *Ecces: Economics, Social, and Development*, 3(1). <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/ecc/article/view/2893>
- Lincoln, A. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. (5th ed.). Penerbit UPP STIM YKPN.
- Lincoln, A. (1993). *Ekonomi Pembangunan*. Penerbit Gunadarma.
- Mankiw, N. G. (2007). *Makroekonomi*. (6th ed). Penerbit Erlangga.
- Masri, Z. A. H. (2021). Analisis Dampak Utang Luar Negeri Terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia Periode 1988-2019. *Journal of Academia Perspectives*, 1(2), 43-56. <https://doi.org/10.30998/jap.v1i2.389>
- Nelson, J. A. (2011). *Ethics, evidence and international debt*. Penerbit University of Massachusetts.
- Permadi, N. (2019). Pengaruh Produksi Perikanan, Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Bruto Sektor Perikanan di Indonesia Tahun 2000-2007. Sarjana Thesis, Universitas Siliwangi. <http://repositori.unsil.ac.id/658/>
- Rachmadi, A. L. (2013). Analisis Pengaruh Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Studi Kasus Tahun 2001-2011). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1(1). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/183>
- Rafikhalif, D. & Nirmalawati, D. (2021). Analisis Pengaruh Utang Luar Negeri Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Periode 1980-2019). *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan*, 10(1), 1-9. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/ekosains>
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (1992). *Makro Ekonomi*. (6th ed). Penerbit Airlangga.
- Sukirno, S. (2013). *Makroekonomi Teori Pengantar*. (3th ed, Vol, 22). Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Suparmoko, M. (2000). *Pengantar Ekonomi Makro*. (4th ed). Penerbit BPFE-Yogyakarta.
- Supriyanto & Sampurna, A. F. (1999). *Utang Luar Negeri Indonesia: Argumen, Relevansi dan Implikasinya bagi Pembangunan*. Penerbit Djambatan.
- Swasono, S. E., Sritua, A. (1999). *Pembangunan Tanpa Utang: Utang Luar Negeri dan Ekonomi Indonesia*. Penerbit Harian Republika.
- Syaparuddin., Umiyati, E., Kusuma, J. (2015). Pengaruh Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Thailand, Malaysia, Philipina, Vietnam, dan Burma Periode 1990-2013. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 10(1), 206-220. <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/paradigma/article/view/3560>

Tambunan, T. (2001). *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran: Teori dan Empiris*. Penerbit LP3ES. Todaro, M. P. (1998). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. (6th ed). Penerbit Erlangga. Zulkarnain, D. (1996). *Masalah Utang Luar Negeri Bagi Negara-negara Berkembang dan Bagaimana Indonesia Mengatasinya*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Arikunto, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.